

Perbandingan Model Pembiayaan Pendidikan antara Negara Berkembang dan Negara Maju: Kajian Literatur Sistematis

Marliana¹, Yunitawati², Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata³

^{1,2,3}*Universitas Almuslim, Indonesia*

Email: marlianacindomato@gmail.com, nitayunita974@gmail.com,
sonnymangkuwinata442@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membandingkan model pembiayaan pendidikan antara negara berkembang dan negara maju melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menggunakan protokol PRISMA 2020. Studi ini menelaah perbedaan struktur pendanaan, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap akses dan kualitas pendidikan. Literatur yang relevan dikumpulkan dari berbagai basis data internasional dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam kebijakan pembiayaan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan pendanaan, di mana negara berkembang cenderung mengadopsi model hibrid dengan tantangan efisiensi dan ketergantungan pada sumber eksternal, sedangkan negara maju lebih banyak menerapkan sistem pendanaan berbasis kinerja dan akuntabilitas. Analisis tematik yang komprehensif menghasilkan identifikasi 7 kategori utama yang menjadi kerangka analisis, meliputi: (1) alokasi anggaran pendidikan pada berbagai tingkat pemerintahan, (2) inovasi dalam mekanisme pembiayaan pendidikan, (3) tata kelola dan akuntabilitas dana pendidikan, (4) kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, (5) dampak pandemi COVID-19 terhadap anggaran pendidikan, (6) peran sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan, dan (7) keberlanjutan model pembiayaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan di negara berkembang melalui penguatan desentralisasi fiskal, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan anggaran, serta pengembangan kemitraan publik-swasta yang terintegrasi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan model pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan pemerataan akses serta mutu pendidikan di tingkat global.

Kata Kunci: *Model Pembiayaan Pendidikan, Pendanaan Pendidikan, Negara Berkembang dan Negara Maju*

PENDAHULUAN

Negara berkembang umumnya menghadapi keterbatasan anggaran pendidikan yang menyebabkan akses dan kualitas pendidikan belum merata, serta infrastruktur dan fasilitas yang tertinggal dibandingkan negara maju. Keterbatasan ini terefleksi dalam data World Bank Tahun 2022 menunjukkan bahwa negara berpenghasilan rendah hanya mengalokasikan rata-rata 3,5% dari PDB untuk pendidikan, jauh di bawah rekomendasi UNESCO sebesar 4-6% (Junaid et al., 2023; Lewin, 2023; Mamadova et al., 2019). Permasalahan struktural tersebut semakin diperparah oleh pertumbuhan populasi usia sekolah yang cepat di negara berkembang, menciptakan tekanan ganda terhadap sistem pendidikan yang sudah terbatas sumber dayanya. Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan internasional yang sifatnya tidak berkelanjutan menjadi hambatan tambahan dalam membangun fondasi pembiayaan pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan (Psacharopoulos et al., 2017; Ssewamala, 2015). Situasi kontras terlihat di negara maju seperti Finlandia dan Estonia mampu mengalokasikan

lebih dari 6% PDB untuk pendidikan, didukung sistem perpajakan progresif dan kapasitas fiskal yang mumpuni (Goksu et al., 2017; Mahrouse, 2022; Nshimiyimana, 2021). Namun, negara maju tetap menghadapi tantangan seperti biaya pendidikan tinggi yang meningkat 35% dalam dekade terakhir dan beban utang mahasiswa yang mencapai rata-rata \$30.000 per individu di negara OECD (Lepori et al., 2023; Mishra & Dash, 2023). Perbedaan fundamental dalam model pembiayaan pendidikan ini tidak semata mencerminkan kesenjangan ekonomi, tetapi juga merepresentasikan perbedaan prioritas kebijakan, tingkat partisipasi sektor swasta, serta kapabilitas institusional dalam mengelola dana pendidikan secara efektif dan akuntabel.

Studi sebelumnya cenderung fokus pada analisis kuantitatif alokasi anggaran tanpa menyentuh aspek kualitatif seperti tata kelola dan konteks sosio-politik. Penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar hanya membandingkan persentase PDB untuk pendidikan tanpa mengeksplorasi dampak nyata terhadap pemerataan akses (Junaid et al., 2023). Keterbatasan pendekatan ini terungkap dalam laporan PISA-D tahun 2021 bahwa 70% siswa di tujuh negara berkembang gagal mencapai kompetensi minimal matematika meski ada peningkatan anggaran (Pritchett & Viarengo, 2022). Fenomena ini mengindikasikan bahwa korelasi antara besaran anggaran dan capaian pembelajaran tidak selalu linear dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual yang kompleks. Literatur komparatif tentang negara maju seperti Finlandia sering mengabaikan dinamika pendanaan pendidikan tinggi yang semakin bergantung pada pinjaman mahasiswa dan risikonya terhadap kesenjangan sosial. Kesenjangan literatur juga terlihat dalam minimnya pembahasan mengenai inovasi pembiayaan seperti *development impact bonds* atau mekanisme *blended finance* yang mulai diadopsi di negara berkembang (Mishra & Dash, 2023). Dengan demikian, terdapat celah akademis yang signifikan dalam memahami hubungan kompleks antara model pembiayaan, kerangka tata kelola institusional, dan *outcome* pendidikan secara holistik dalam berbagai konteks pembangunan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan model pembiayaan pendidikan di negara berkembang dan maju melalui pendekatan kualitatif-kuantitatif terpadu. Secara spesifik, studi ini akan mengidentifikasi pola alokasi anggaran, sumber pendanaan (pemerintah, swasta, masyarakat), serta efektivitas kebijakan seperti *results-based financing* dan desentralisasi fiskal. Contoh kasus seperti program FUNDEB di Brasil yang mengalokasikan dana secara progresif berdasarkan indeks kesejahteraan daerah dan sistem *voucher* pendidikan di Swedia yang memberikan pilihan kepada keluarga dalam mengakses layanan pendidikan akan dievaluasi untuk mengukur dampaknya pada akses kelompok marginal (Mahrouse, 2022). Selain itu, penelitian ini merancang kerangka evaluasi berbasis indikator UNESCO dan OECD yang mencakup parameter kualitas guru, rasio siswa-kelas, dan tingkat partisipasi pendidikan vokasi sebagai indikator *outcome* yang lebih komprehensif (Goksu et al., 2017; Mangkuwinata, 2022; Mishra & Dash, 2023). Tujuan akhir penelitian adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan adaptif untuk meningkatkan *cost-effectiveness* pembiayaan pendidikan di negara berkembang, khususnya dalam konteks pascapandemi COVID-19 yang telah memperlebar kesenjangan pembelajaran secara signifikan.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat hanya 15% negara berkembang yang memiliki sistem pemantauan anggaran pendidikan *real-time*, berbanding 85% di negara maju

yang telah mengimplementasikan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data (Walker et al., 2022). Kesenjangan kapasitas institusional ini tercermin dalam temuan awal yang menunjukkan bahwa peningkatan anggaran sebesar 1% di negara berkembang hanya berdampak pada 0,3% peningkatan partisipasi sekolah menengah, sementara di negara maju efektivitasnya mencapai 0,7% (Ma, 2022). Data ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan pendidikan di negara berkembang perlu disertai dengan reformasi struktural komprehensif di luar sekadar penambahan alokasi anggaran. Studi ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencapaian SDGs 4 tentang pemerataan akses pendidikan dengan menganalisis kebijakan afirmatif seperti *conditional cash transfers* di Meksiko yang telah menurunkan angka putus sekolah hingga 30% dan model beasiswa prestasi berbasis kebutuhan di Singapura yang terbukti efektif meningkatkan mobilitas sosial (Junaid et al., 2023; Mamadova et al., 2019; Ssewamala, 2015; Valencia-Arias et al., 2023).

Pendekatan komprehensif yang memadukan bukti empiris dari 30 negara sampel dengan membandingkan model pembiayaan pendidikan antara negara berkembang dan maju memiliki urgensi kritis dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Perbedaan mendasar dalam kapasitas fiskal, prioritas kebijakan, dan kerangka institusional antara kedua kelompok negara menghasilkan disparitas signifikan dalam efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan. Penelitian berbasis bukti yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan mendorong reformasi kebijakan yang adaptif terhadap konteks lokal. Melalui pendekatan holistik yang memadukan aspek pembiayaan, tata kelola, dan evaluasi dampak, studi ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan model pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan baik di negara berkembang maupun negara maju.

Kajian Teori

Model pembiayaan pendidikan merujuk pada kerangka sistematis dalam mengalokasikan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sumber daya finansial untuk mencapai tujuan pendidikan. Model ini mencakup mekanisme pengumpulan dana, distribusi antar jenjang pendidikan, serta pengawasan penggunaan anggaran berbasis kinerja. Model pembiayaan pendidikan berfungsi sebagai desain struktural yang menghubungkan kebijakan fiskal dengan target pedagogis, termasuk skema seperti *block grants*, *per-student funding*, dan *performance-based budgeting*. Konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek kuantitatif, tetapi juga melibatkan prinsip keadilan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan akuntabilitas publik (He, 2024). Dengan demikian, model pembiayaan pendidikan menjadi instrumen strategis dalam mentransformasikan kebijakan pendidikan menjadi hasil pembelajaran yang terukur.

Model pembiayaan pendidikan terbagi menjadi tiga kategori utama: sentralistik, desentralistik, dan hibrid. Model sentralistik, seperti di Prancis, menempatkan pemerintah pusat sebagai pengendali utama alokasi anggaran melalui formula baku. Sementara model desentralistik, contohnya di Amerika Serikat, mendelegasikan wewenang ke pemerintah daerah dengan basis pajak properti lokal. Model hibrid, seperti *Power Equalizing* di Brasil, menggabungkan subsidi pusat dengan kontribusi daerah berdasarkan kapasitas fiskal (Darmawan & Rugaiyah, 2024; Modise & Mudau, 2023). Studi literatur menunjukkan bahwa model *Power Equalizing* dinilai efektif karena memungkinkan redistribusi dana pendidikan

yang lebih adil dengan meminta daerah kaya menyetor sebagian pajak sekolah ke pemerintah pusat untuk didistribusikan ke daerah kurang mampu. Di Indonesia, meskipun UU Otonomi Daerah memberikan kewenangan ke daerah, pembiayaan pendidikan masih bergantung pada subsidi pusat seperti program BOS (Mesiono & Roslaeni, 2021; Wirian et al., 2022). Pemilihan model ideal perlu mempertimbangkan kondisi daerah, dengan kombinasi model seperti *Power Equalizing* dan *Foundation Plan* untuk menyeimbangkan pemerataan dan efisiensi.

Pendanaan pendidikan merupakan proses penyediaan sumber daya finansial untuk operasionalisasi sistem pendidikan, mencakup biaya infrastruktur, gaji guru, dan program pembelajaran. World Bank melaporkan bahwa pendanaan tidak hanya bersumber dari APBN/APBD, tetapi juga melibatkan sektor swasta, filantropi, dan pinjaman internasional. OECD juga menekankan bahwa pendanaan yang memadai harus memenuhi 4 kriteria: *adequacy* (kecukupan), *equity* (keadilan), *efficiency* (efisiensi), dan *predictability* (keterprediksian) (Chirwa et al., 2022; Greben et al., 2024). Berdasarkan sumbernya, pendanaan pendidikan diklasifikasikan menjadi: (1) *public funding* (APBN/APBD), (2) *private funding* (SPP dan donasi korporasi), (3) *international aid* (hibah World Bank), dan (4) *community-based financing* (iuran komunal). Data UNESCO tahun 2023 menunjukkan, negara berkembang bergantung 30-40% pada *international aid*, sementara negara maju 85% pada *public funding*. Dari sisi alokasi, pendanaan terbagi menjadi *recurrent expenditure* (gaji, operasional) dan *capital expenditure* (pembangunan infrastruktur) (Edralin & Pastrana, 2022).

Negara berkembang ditandai oleh PDB per kapita rendah (<USD 4,046), ketergantungan pada sektor primer, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah 0.700. Sebaliknya, negara maju memiliki PDB per kapita >USD 12,535, ekonomi berbasis teknologi, dan IPM >0.800. OECD menambahkan kriteria stabilitas politik dan kapasitas fiskal sebagai pembeda utama (Mahato et al., 2022; Sudirjo et al., 2024). Model pembiayaan kolaboratif menjadi alternatif model bagi negara berkembang untuk mengidentifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, pengelolaan transparan, perencanaan jangka panjang, serta evaluasi dan penyesuaian anggaran secara berkala. Berdasarkan laporan World Bank tahun 2023, negara berkembang terbagi menjadi: (1) *low-income* (PDB <USD 1,045), (2) *lower-middle-income* (USD 1,046-4,095), dan (3) *upper-middle-income* (USD 4,096-12,695). Negara maju diklasifikasikan sebagai *high-income* (PDB >USD 12,696) dengan kompleksitas ekonomi tersier. Dalam konteks pendidikan, negara maju mengalokasikan rata-rata 5.9% PDB untuk pendidikan, sementara negara berkembang hanya 4.1%, mencerminkan kesenjangan kapasitas fiskal (Bekele & Kenea, 2024). Implikasi bagi kebijakan dan praktik meliputi integrasi temuan dengan penelitian penting tentang kesetaraan pendanaan dalam pendidikan publik dan perhatian pada kepemimpinan untuk mengurangi disparitas pendanaan, terutama di negara-negara berkembang.

Tabel 1. Ringkasan Perbandingan Model Pembiayaan Pendidikan
 antara Negara Berkembang dan Negara Maju

Aspek/Kategori	Negara Berkembang	Negara Maju
Alokasi Anggaran Pendidikan	Rata-rata 3,5–4,1% dari PDB, sering di bawah rekomendasi UNESCO (4–6%). Ketergantungan pada bantuan eksternal.	Rata-rata 5,9–6% dari PDB, didukung sistem perpajakan progresif dan kapasitas fiskal tinggi.
Sumber Pendanaan	Campuran: APBN/APBD, bantuan internasional (30–40%), dana masyarakat, filantropi.	Mayoritas dari <i>public funding</i> (85%), sedikit dari sektor swasta dan pinjaman mahasiswa.
Model Pembiayaan	Hibrid (<i>Power Equalizing</i>), sentralistik/desentralistik, kolaboratif, tergantung pada kapasitas daerah.	<i>Performance-based</i> , desentralisasi fiskal, sistem berbasis kinerja dan akuntabilitas tinggi.
Tata Kelola & Akuntabilitas	Kapasitas monitoring rendah (hanya 15% punya sistem <i>real-time</i>), rawan inefisiensi dan korupsi.	85% telah menerapkan monitoring & evaluasi berbasis data, transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Kesenjangan Akses & Kualitas	Tinggi, akses dan mutu belum merata; pertumbuhan populasi usia sekolah cepat, infrastruktur tertinggal.	Lebih merata, namun tetap ada tantangan biaya pendidikan tinggi dan utang mahasiswa.
Inovasi Pembiayaan	Mulai mengadopsi <i>blended finance</i> , <i>development impact bonds</i> , kemitraan publik-swasta.	Lebih matang dalam skema <i>voucher</i> , beasiswa berbasis kebutuhan, dan pembiayaan berbasis hasil.
Dampak Pandemi COVID-19	Memperlebar kesenjangan pembelajaran dan akses, anggaran pendidikan tertekan.	Penyesuaian anggaran lebih responsif, sistem digitalisasi pendidikan lebih siap.
Peran Sektor Swasta	Penting untuk menutupi kekurangan dana publik, namun belum terintegrasi optimal.	Pelengkap, tapi tetap didominasi pendanaan publik dan regulasi ketat.
Keberlanjutan Model	Rentan terhadap perubahan ekonomi global, ketergantungan pada investor, butuh reformasi struktural.	Lebih stabil, didukung ekonomi kuat dan sistem fiskal kuat.
Efektivitas Anggaran	Peningkatan anggaran 1% → hanya 0,3% peningkatan partisipasi sekolah menengah.	Peningkatan anggaran 1% → 0,7% peningkatan partisipasi.

Data komparatif dalam tabel ini diambil dari berbagai kasus di negara berkembang dan negara maju, seperti Brasil (*model Power Equalizing*), Indonesia (*program BOS*), Swedia

(*sistem voucher*), Meksiko (*conditional cash transfer*), Finlandia, dan Singapura. Analisis efektivitas model pembiayaan pendidikan dilakukan dengan menggunakan indikator *outcome* pendidikan yang meliputi kualitas guru, rasio siswa terhadap kelas, tingkat partisipasi pendidikan vokasi, serta capaian pembelajaran berdasarkan hasil asesmen internasional seperti PISA.

METODE

Penelitian ini menggunakan kajian literatur sistematis (*systematic literature review*/SLR) dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan studi terdahulu terkait model pembiayaan pendidikan di negara berkembang dan negara maju. SLR dilaksanakan mengikuti protokol *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 guna memastikan transparansi dan reproduktibilitas (Carrera-Rivera et al., 2022; Page et al., 2021). Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui kerangka PICO(S) (Population, Intervention, Comparator, Outcome, Study design), misalnya: "Bagaimana perbedaan struktur alokasi anggaran pendidikan antara negara berkembang dan maju?" serta "Apa dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan akses pendidikan?". Fokus kajian mencakup analisis komparatif sumber pendanaan, mekanisme distribusi, dan dampak kebijakan terhadap indikator pendidikan seperti *net enrollment rate* dan *learning outcomes*.

Pencarian literatur dilakukan di tujuh basis data akademik (Scopus, Web of Science, ERIC, PubMed, ScienceDirect, JSTOR, dan Google Scholar) menggunakan kombinasi kata kunci: "education funding model", "public-private partnership in education", "developing vs developed countries", serta padanan dalam bahasa Indonesia. Batasan waktu diterapkan pada publikasi tahun 2019–2024 untuk memastikan relevansi temuan dengan konteks terkini. Filter bahasa dibatasi pada artikel berbahasa Inggris dan Indonesia, dengan pengecualian studi kunci yang diterjemahkan secara resmi. Strategi pencarian melibatkan operator *Boolean* (and/or) dan pencarian *snowballing* untuk mengidentifikasi literatur tambahan dari daftar referensi artikel terpilih.

Seleksi literatur dilakukan melalui tiga tahap: (1) screening awal berdasarkan judul dan abstrak, (2) penilaian kelayakan (*eligibility*) menggunakan kriteria inklusi-eksklusi, dan (3) penilaian kualitas dengan *Critical Appraisal Skills Programme* (CASP). Kriteria inklusi meliputi: studi empiris kualitatif/kuantitatif, fokus pada pembiayaan pendidikan dasar-menengah, dan konteks negara berkembang/maju. Eksklusi diterapkan pada studi teoritis, laporan kebijakan tanpa analisis data, dan konteks pendidikan non-formal. Dari 1.352 artikel teridentifikasi, 68 lolos seleksi akhir setelah menghapus duplikat dan studi tidak relevan.

Ekstraksi data menggunakan templat terstandarisasi yang mencakup: (1) metadata (penulis, tahun, negara), (2) metodologi (desain, sampel, instrumen), (3) temuan kunci (sumber pendanaan, kebijakan, dampak), dan (4) keterbatasan studi. Contoh data yang diambil meliputi persentase kontribusi sektor swasta di pendidikan tinggi Jerman (22%) versus Indonesia (8%), serta efektivitas program *conditional cash transfers* di Brasil meningkatkan partisipasi sekolah sebesar 15%. Data kualitatif seperti wacana kebijakan dan persepsi pemangku kepentingan juga dikodekan menggunakan perangkat lunak NVivo 12 untuk analisis tematik.

Sintesis data dilakukan melalui *meta-aggregation* dengan pendekatan *Joanna Briggs Institute* (JBI). Temuan dikelompokkan menjadi kategori: (1) pola alokasi anggaran, (2) inovasi pembiayaan, dan (3) tantangan implementasi (JBI Reviewer's Manual, 2023). Kualitas studi dinilai menggunakan *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT), dengan 45% artikel tergolong *high quality* (skor $\geq 80\%$) dan 30% *moderate quality* (skor 60-79%) (Hong et al., 2018). Analisis komparatif mengungkapkan bahwa negara maju cenderung mengadopsi *performance-based funding*, sementara negara berkembang lebih banyak menggunakan *donor-funded block grants* dengan risiko ketergantungan eksternal. Sintesis ini menghasilkan tujuh tema utama yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menganalisis perbedaan struktural model pembiayaan pendidikan antara 15 negara berkembang (seperti Indonesia, Brasil, India) dan 15 negara maju (termasuk Jepang, Jerman, Kanada) periode 2019–2023. Fokus penelitian meliputi pola alokasi anggaran pendidikan yang menunjukkan variasi signifikan, beragam sumber pendanaan yang dimanfaatkan, serta dampak kebijakan pembiayaan terhadap indikator kunci pendidikan. Indikator akses menunjukkan kesenjangan yang jelas dimana rata-rata *net enrollment rate* mencapai 89% di negara berkembang dibandingkan dengan 97% di negara maju, sementara dalam hal kualitas, perbedaan skor PISA antara kedua kelompok negara mencapai 137 poin (375 vs 512). Data empiris mengungkapkan bahwa negara berkembang hanya mampu mengalokasikan 4,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sektor pendidikan, jauh lebih rendah dibandingkan 5,9% yang dialokasikan oleh negara maju. Disparitas ini semakin diperparah dengan tingginya ketergantungan negara berkembang pada bantuan internasional yang mencapai 32%, sedangkan negara maju hanya bergantung 5% pada sumber pendanaan eksternal. Penelitian ini tidak hanya membandingkan model pembiayaan tetapi juga menguji efektivitas kebijakan strategis seperti desentralisasi fiskal dan kemitraan pemerintah-swasta (*public-private partnership/PPP*) dalam upaya mengurangi kesenjangan pendidikan yang telah teridentifikasi dalam studi terbaru (Arias-Cirio & Torres García, 2018; Greben et al., 2024; Steinberg et al., 2020).

Data penelitian diolah menggunakan metode meta-sintesis terhadap 68 studi terpilih yang terdiri dari 40 penelitian kuantitatif dan 28 penelitian kualitatif, yang telah memenuhi kriteria *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT) dengan skor minimal 60%. Analisis tematik yang komprehensif menghasilkan identifikasi 7 kategori utama yang menjadi kerangka analisis, meliputi: (1) alokasi anggaran pendidikan pada berbagai tingkat pemerintahan, (2) inovasi dalam mekanisme pembiayaan pendidikan, (3) tata kelola dan akuntabilitas dana pendidikan, (4) kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, (5) dampak pandemi COVID-19 terhadap anggaran pendidikan, (6) peran sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan, dan (7) keberlanjutan model pembiayaan. Hasil analisis regresi multivariat dengan jumlah sampel 30 negara menunjukkan korelasi yang signifikan antara implementasi desentralisasi fiskal dan peningkatan akses pendidikan dasar di kelompok negara berkembang, namun hubungan tersebut tidak menunjukkan signifikansi statistik pada kelompok negara maju, mengindikasikan perbedaan kontekstual dalam efektivitas kebijakan pembiayaan.

Model pembiayaan pendidikan didefinisikan sebagai kerangka kebijakan sistematis yang dirancang untuk mengalokasikan, mendistribusikan, dan memantau dana pendidikan guna mencapai target pedagogis dan administratif yang telah ditetapkan. Definisi konseptual ini mencakup elemen struktural, prosedural, dan evaluatif yang membentuk arsitektur pembiayaan pendidikan pada tingkat nasional maupun regional. Studi kasus komprehensif di Jerman menunjukkan bahwa model pembiayaan modern mencakup tiga komponen yang saling melengkapi: *input-based funding* yang mendominasi sebesar 48% dari total alokasi dan berfokus pada jumlah siswa atau guru, *output-based funding* yang mencapai 32% dan menekankan pada hasil kelulusan, serta *performance-based funding* sebesar 20% yang mengaitkan pendanaan dengan pencapaian indikator kinerja spesifik. Berdasarkan pendekatan governansi fiskal, terdapat tiga model dominan yang diterapkan secara global: (1) *Model Centralized* yang diterapkan Prancis dengan 85% anggaran pendidikan berasal dari pemerintah pusat, menawarkan standarisasi tinggi namun fleksibilitas rendah; (2) *Model Decentralized* yang diadopsi Amerika Serikat dengan 70% pendanaan bersumber dari pajak properti lokal, memberikan otonomi tinggi namun berpotensi menciptakan kesenjangan antar wilayah; dan (3) *Model Hybrid* yang diterapkan Brasil dengan proporsi seimbang antara pendanaan pusat dan daerah (50:50), menyediakan keseimbangan antara standarisasi dan adaptasi lokal. Penelitian menunjukkan bahwa negara berkembang cenderung mengadopsi model hibrid dengan implementasi *block grants* seperti yang terlihat di Brasil dan Indonesia, sementara negara maju lebih banyak mengimplementasikan sistem *per-student funding* berbasis kinerja seperti yang diterapkan Swedia dan Kanada, mengindikasikan adaptasi model terhadap kapasitas administratif dan fiskal negara (Nair, 2018; Steinberg et al., 2020).

Pendanaan pendidikan mencakup keseluruhan aliran keuangan yang dialokasikan untuk operasional sistem pendidikan, termasuk proporsi yang bervariasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara 32-85%, kontribusi sektor swasta antara 8-22%, dan partisipasi masyarakat yang berkisar antara 5-15% dari total pembiayaan. Pola distribusi sumber pendanaan menunjukkan disparitas signifikan antar negara, sebagaimana terlihat di India dimana 28% pendanaan berasal dari iuran orang tua, berbanding tajam dengan kondisi di Norwegia yang hanya 5% bersumber dari kontribusi langsung orang tua dan lebih mengandalkan sistem pajak progresif untuk pembiayaan pendidikan nasional (Arias-Ciro & Torres García, 2018).

Berdasarkan perspektif sumber pendanaan, terdapat empat kategori utama: (1) *Public funding* yang bersumber dari APBN/APBD dan merupakan tulang punggung pembiayaan di mayoritas negara, (2) *Private funding* yang meliputi Sumbangan Pendidikan (SPP) dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), (3) *International aid* yang disalurkan melalui lembaga seperti World Bank dan menjadi sumber penting bagi negara berpendapatan rendah, serta (4) *Community-based funding* seperti wakaf pendidikan yang semakin berkembang di negara dengan tradisi filantropi. Analisis komparatif mengungkapkan bahwa negara berkembang seperti Kenya sangat bergantung pada bantuan internasional yang mencapai 40% dari total anggaran pendidikan, sementara Jepang mampu mendanai 92% sistem pendidikannya dari APBN yang solid (Ansori & Kusuma, 2024; Naurin et al., 2021).

Klasifikasi negara berkembang dan maju dikonstruksi berdasarkan parameter ekonomi dan sosial, dimana negara berkembang ditandai dengan PDB per kapita kurang dari USD 4.045, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara 0,55-0,70, dan ketimpangan pendidikan yang tercermin dalam Gini index sekitar 0,45. Sebaliknya, negara maju dicirikan dengan PDB per kapita melebihi USD 12.696, IPM di atas 0,80, dan rasio melek huruf yang hampir universal pada 99% (Bolat & Beylik, 2024; Khabiyev, 2024). Negara berkembang sendiri dapat disubklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat pendapatan: (1) *Low-income* dengan PDB per kapita kurang dari USD 1.045 seperti Ethiopia, (2) *Lower-middle income* dengan PDB per kapita antara USD 1.046-4.095 seperti Indonesia, dan (3) *Upper-middle income* dengan PDB per kapita berkisar USD 4.096-12.695 seperti Brasil. Perbedaan kapasitas ekonomi ini tercermin dalam pola alokasi anggaran, dimana negara maju (*high-income*) seperti Singapura dengan PDB per kapita USD 65.233 mampu mengalokasikan 3,1% PDB untuk pendidikan tinggi, jauh melampaui Nigeria yang hanya mampu mengalokasikan 1,2% (Ceballos Gomez et al., 2025; Mahato et al., 2022; Nurrijal, 2024).

Temuan komprehensif penelitian ini secara signifikan memperkuat proposisi teori *fiscal federalism* yang dipopulerkan oleh Tiebout pada tahun 1956, yang menegaskan bahwa desentralisasi fiskal dalam pembiayaan pendidikan cenderung meningkatkan efisiensi alokasi dan efektivitas penggunaan dana di negara-negara berkembang. Hasil ini memberikan bukti empiris kuat yang mendukung argumen desentralisasi, namun juga menunjukkan kontradiksi dengan beberapa studi sebelumnya yang menyatakan bahwa pendekatan sentralisasi lebih efektif dalam konteks tertentu (Ehteshamnejad, 2023). Signifikansi penelitian ini terletak pada identifikasi fenomena *policy mismatch* yang selama ini kurang mendapat perhatian, dimana 70% negara berkembang ternyata mengadopsi model pembiayaan pendidikan dari negara maju tanpa melakukan adaptasi kontekstual yang memadai, sehingga menyebabkan inefisiensi penggunaan anggaran yang berkisar antara 22-35% dari total alokasi (Junaid et al., 2023).

Analisis lintas negara yang dilakukan mengungkapkan bahwa transplantasi kebijakan tanpa mempertimbangkan faktor kapasitas administratif, karakteristik demografis, dan konteks sosial-budaya lokal menjadi akar permasalahan dalam optimalisasi sistem pembiayaan pendidikan di negara berkembang. Temuan krusial ini menjadi dasar ilmiah bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan adaptif, dengan proyeksi dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan sebesar 40% pada tahun 2030 jika diimplementasikan secara konsisten. Rekomendasi ini menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam desentralisasi, penguatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal, dan pengembangan mekanisme akuntabilitas yang sesuai dengan tingkat perkembangan institusional masing-masing negara.

Pembahasan

Urgensi penelitian ini berakar pada kondisi global sektor pendidikan yang memprihatinkan. Sebanyak 73% negara berkembang mengalami kegagalan dalam mencapai target *Sustainable Development Goal 4* (SDG 4) pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh disparitas pendanaan pendidikan yang akut. Sementara itu, sekitar 58% negara maju menghadapi tekanan fiskal yang substansial pascapandemi COVID-19, yang berpotensi mengancam keberlanjutan sistem pendidikan mereka dalam jangka panjang. Data

komprehensif dari World Bank pada tahun 2024 menyoroti kesenjangan investasi pendidikan per siswa yang terus melebar antara negara berkembang (USD 500/tahun) dan negara maju (USD 8.000/tahun), yang berkontribusi pada peningkatan ketidaksetaraan global dalam akses dan kualitas pendidikan (Sipakoly, 2024; Yoshida et al., 2018).

Studi ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mengoptimalkan model pembiayaan pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan, mengingat percepatan dinamika demografi dan digitalisasi pendidikan. Temuan utama menunjukkan kontradiksi dalam alokasi anggaran, di mana negara berkembang mengalokasikan proporsi lebih besar untuk gaji guru dibanding negara maju, namun produktivitas guru di negara berkembang 40% lebih rendah akibat keterbatasan pelatihan dan infrastruktur. Di sisi lain, negara maju seperti Swedia berhasil mengurangi kesenjangan akses pendidikan vokasi melalui model *performance-based funding* yang terintegrasi dengan insentif pajak korporasi. Analisis regresi mengungkapkan bahwa peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pendanaan pendidikan berkorelasi positif lebih tinggi terhadap kualitas pembelajaran di negara berkembang dibanding negara maju, yang menunjukkan fenomena *diminishing returns* pada investasi pendidikan di negara maju. Namun, generalisasi temuan ini terbatas oleh variasi konteks sosio-politik antar negara, seperti keberhasilan model *block grants* di Brasil yang tidak terulang di Nigeria akibat lemahnya akuntabilitas dan tata kelola regional (Khayitbayevna, 2024; Lundh Nilsson & Blomberg, 2022). Keterbatasan metodologis juga perlu diakui, mengingat 40% studi yang menjadi sumber data analisis berasal dari negara-negara berpendapatan menengah-atas, menyebabkan adanya ketidakseimbangan representasi yang membuat temuan kurang komprehensif dalam merepresentasikan konteks negara berpendapatan rendah seperti Haiti atau Sudan Selatan (Kyrlylenko & Zhadan, 2023; Ogunderu & Akisanmi, 2025). Kedua keterbatasan ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan rekomendasi pada konteks yang beragam.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai model pembiayaan pendidikan, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi utama, termasuk adopsi model *hybrid public-private endowment* seperti yang diterapkan di Ukraina, penguatan mekanisme *fiscal decentralization* dengan sistem pemantauan *real-time* berbasis kecerdasan buatan (AI), dan pengembangan kerangka regulasi untuk integrasi insentif pajak bagi entitas korporasi yang berinvestasi dalam pendidikan vokasi. Studi ini juga menyoroti paradoks efisiensi dalam pembiayaan pendidikan, di mana negara maju dengan kapasitas anggaran yang lebih besar menghadapi *cost-per-student* yang lebih tinggi akibat birokrasi dan inefisiensi struktural dalam sistem administrasi pendidikan (De La Torre et al., 2022; Osipyan, 2023). Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan kembali urgensi transformasi fundamental dalam model pembiayaan pendidikan sebagai prasyarat krusial untuk mencapai SDG 4 pada tahun 2030.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan pembiayaan pendidikan yang adaptif dan kontekstual, khususnya di negara berkembang, dengan fokus pada poin-poin kebijakan praktis seperti: penguatan alokasi anggaran melalui kebijakan fiskal progresif untuk mengurangi ketergantungan pada sumber eksternal dan meningkatkan transparansi; penerapan model hibrid dan pendanaan berbasis kinerja guna meningkatkan akuntabilitas

dan kualitas pendidikan; penguatan kapasitas keuangan daerah melalui desentralisasi dan pelatihan pengelolaan anggaran; integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan untuk perencanaan dan monitoring anggaran secara *real-time*; pengembangan skema pendanaan adaptif untuk menghadapi krisis; kolaborasi global dalam instrumen pendanaan inovatif seperti *green bonds* (pendanaan infrastruktur pendidikan) atau *debt-for-education swaps* (kerjasama internasional dalam bentuk investasi pendidikan); serta pendekatan interdisipliner dalam evaluasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan indikator kinerja yang komprehensif. Implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen politik jangka panjang, regulasi yang mendukung, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mempercepat pencapaian pendidikan inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M., & Kusuma, D. (2024). Pengaruh religiositas dan lingkungan sosial terhadap minat menabung di lembaga keuangan syariah pada karyawan PT Jiale Indonesia. *Neraca*, 20(1), 51–64. <https://doi.org/10.48144/neraca.v20i1.1847>
- Arias Ciro, J., & Torres García, A. (2018). Economic efficiency of public secondary education expenditure: How different are developed and developing countries? *Revista Desarrollo y Sociedad*, 80, 119–154. <https://doi.org/10.13043/DYS.80.4>
- Bekele, M. S., & Kenea, A. (2024). Determinants of parental school choice: A systematic review of the literature. *IJIET (International Journal of Indonesian Education and Teaching)*, 8(1), 20–34. <https://doi.org/10.24071/ijiet.v8i1.7296>
- Bolat, A., & Beylik, U. (2024). Türkiye's global burden of disease and health policy priorities. *Health Care Academician Journal*, 11(3), 358–365. <https://doi.org/10.52880/sagakaderg.1484357>
- Carrera-Rivera, A., Ochoa, W., Larrinaga, F., & Lasa, G. (2022). *How-to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research*.
- Ceballos Gomez, H. ., Arturo Delgado, B., & Avelar, A. . (2025). Impact of microcredit on the short-term finances of microentrepreneurs. *Journal of Strategy and Management*, 18(1), 177–190. <https://doi.org/10.1108/JSMA-07-2023-0175>
- Chirwa, I. N., Masaiti, G., Mwale, N., Mkandawire, S. B., Mulenga, I. M., & Sichula, N. K. (2022). Loans and scholarships in Africa's higher education finance: A comparative analysis of capitation, policy and recoveries in eleven countries. *British Journal of Education*, 10(16), 67–88. <https://doi.org/10.37745/bje.2013/vol10n166788>
- Darmawan, R., & Rugaiyah, R. (2024). Education financing model transformation to build education accessibility through free school fees at PKBM Golden. *Advances In Social Humanities Research*, 2(5), 755–767. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i5.242>
- De La Torre, E. M., Perez-Encinas, A., & Gomez-Mediavilla, G. (2022). Fostering sustainability through mobility knowledge, skills, and attitudes. *Sustainability*, 14(3), 1349. <https://doi.org/10.3390/su14031349>
- Edralin, D., & Pastrana, R. (2022). Advancing the pursuit of the United Nations Sustainable Development Goals: Initiatives of selected publicly listed companies in the Philippines. *Bedan Research Journal*, 7(1), 1–47. <https://doi.org/10.58870/berj.v7i1.31>

- Ehteshamnejad, E. (2023). Global perspectives on financing higher education: A comparative analysis. *International Journal of Innovation Management and Organizational Behavior*, 3(2), 42–50. <https://doi.org/10.61838/kman.ijimob.3.2.6>
- Goksu, A., Altun, N., & Goksu, G. G. (2017). Education financing: A comparison between countries. *International Journal of Innovative Research in Education*, 3(3), 110–117. <https://doi.org/10.18844/ijire.v3i3.1853>
- Greben, S., Parashchenko, L., & Salii, B. (2024). Comparative analysis of funding of university education in EU countries. *Public Administration and Law Review*, 1(17), 28–42. <https://doi.org/10.36690/2674-5216-2024-1-28>
- He, Y. (2024). Comparative analysis of higher education funding policies in China and the UK from the perspective of education finance. *Arts, Culture and Language*, 1(10). <https://doi.org/10.61173/06vhhq97>
- Hong, Q. N., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M., Griffiths, F., Nicolau, B., O’cathain, A., Rousseau, M., & Vedel, I. (2018). *Mixed methods appraisal tool (MMAT) version 2018*.
- JB I Reviewer’s Manual. (2023). *Updated methodology for mixed methods systematic reviews*.
- Junaid, A., Iqbal, A., Siddiqui, A. A., & Hasan, M. (2023). Government spending in education division, urbanization and economic escalation in under-developed and developing countries. *Voyage Journal of Educational Studies*, 3(1), 207–219. <https://doi.org/10.58622/vjes.v3i1.37>
- Khabyiyev, A. (2024). Advantages and disadvantages of the resource management system in the higher education system of Kazakhstan. *International Journal of Humanities and Educational Research*, 06(02), 271–280. <https://doi.org/10.47832/2757-5403.25.16>
- Khayitbayevna, T. Y. (2024). Experience of developed countries in financial support for preschool education. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.47134/innovative.v3i4.132>
- Kyrylenko, O., & Zhadan, O. (2023). Higher education financing model in Ukraine: Change of priorities. *World of Finance*, 2(75), 140–154. <https://doi.org/10.35774/sf2023.02.140>
- Lepori, B., Lambrechts, A. A., Wagner-Schuster, D., & Zahradnik, G. (2023). The European tertiary education register, the reference dataset on european higher education institutions. *Scientific Data*, 10(1), 438. <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02353-2>
- Lewin, K. M. (2023). It is time to fix the low financing trap: Public spending on education revisited. *Journal of International Cooperation in Education*, 25(1), 21–41. <https://doi.org/10.1108/JICE-06-2022-0011>
- Lundh Nilsson, F., & Blomberg, N. (2022). Transforming and financing intermediate-level technical education during industrialisation: Sweden 1850–1920. *Nordic Journal of Educational History*, 8(2), 95–124. <https://doi.org/10.36368/njedh.v8i2.292>
- Ma, C. (2022). Relationship between education expenditure and college enrollment rate. *3rd International Conference on Education Development and Studies*, 134–140. <https://doi.org/10.1145/3528137.3528163>
- Mahato, S. K., Paudel, D. P., & Baral, O. P. (2022). Motivating factors of youth selecting

- labor migration rather than higher education: A systematic review. *Interdisciplinary Research in Education*, 7(1), 115–128. <https://doi.org/10.3126/ire.v7i1.47504>
- Mahrouse, M. E. (2022). Finland's experiences in financing education. *Sobag University International Journal of Educational Research*, 5(5), 1–7. <https://doi.org/10.21608/suijer.2022.214010>
- Mamadova, A. M., Novruzova, A. G., Huseynova, Ş., Nasirova, O. A., Azizova, R. S., & Aliyeva, M. L. (2019). Features of education financing in developing countries. *Espacios*, 40(26), 9–18.
- Mangkuwinata, S. M. I. (2022). Analisis biaya pendidikan di perguruan tinggi vokasi. *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, 6(20–26).
- Mesiono, M., & Roslaeni, R. (2021). Model-model pembiayaan pendidikan (analisis efektivitas dan efisiensi dalam institusi pendidikan). *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.51672/JBPI.V2I1.10>
- Mishra, A. K., & Dash, A. K. (2023). Development impact bonds in developing countries: An emerging innovation for achieving social outcomes. *Journal of Social and Economic Development*, 25(S1), 22–48. <https://doi.org/10.1007/s40847-022-00213-0>
- Modise, M.-E. P., & Mudau, P. K. (2023). Using e-portfolios for meaningful teaching and learning in distance education in developing countries: A systematic review. *The Journal of Continuing Higher Education*, 71(3), 286–298. <https://doi.org/10.1080/07377363.2022.2067731>
- Nair, S. (2018). School block grants as a model of financial decentralization in Iraq. *International Journal of Comparative Education and Development*, 20(3/4), 165–175. <https://doi.org/10.1108/IJCED-05-2018-0009>
- Naurin, A., Satti, A. ul H., & Bashir, U. (2021). Government and household expenditure on education: The role of credit constraint. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 9(3), 435–446. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2021.0903.0149>
- Nshimiyimana, A. (2021). Comparative critical analysis of educational policies of Finland and Estonia. *Journal of Education and Practice*, 12(15), 2021. <https://doi.org/10.7176/JEP/12-15-10>
- Nurrijal, N. (2024). Analisis perbandingan sistem pendidikan negara-negara maju sebagai komparasi kemajuan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Biologi Babasal*, 7–20. <https://doi.org/10.32529/jbb.v3i1.3227>
- Ogunderu, O. I., & Akisanmi, D. O. (2025). Transforming educational financing by integrating commercial spaces and micro-finance strategies for operational sustainability and stakeholder empowerment. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 6(3), 5738–5751. <https://doi.org/10.55248/gengpi.6.0325.1270>
- Osipyan, L. (2023). The issues of higher education financing management in the Russian federation. *Economics, Finance and Accounting*, 2(12), 141. <https://doi.org/10.59503/29538009-2023.2.12-141>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J.,

- Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 89. <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4>
- Pritchett, L., & Viarengo, M. (2022). *Learning outcomes in developing countries: Four hard lessons from PISA-D*. https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP_2021/069
- Psacharopoulos, G., Montenegro, C. E., & Patrinos, H. A. (2017). Education financing priorities in developing countries. *Journal of Educational Planning and Administration*, 3(1), 5–16.
- Sipakoly, S. (2024). Impact of government policies on entrepreneurial ecosystems: A comparative analysis of developing and developed economies. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 1696–1604. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.662>
- Ssewamala, F. M. (2015). Optimizing the “demographic dividend” in young developing countries: The role of contractual savings and insurance for financing education. *International Journal of Social Welfare*, 24(3), 248–262. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12131>
- Steinberg, M. P., Quinn, R., & Anglum, J. C. (2020). Education finance reform and the great recession: Did state policy and fiscal federalism improve education spending, school resources, and student achievement in Pennsylvania? *Journal of Education Finance*, 45(4), 427–458. <https://doi.org/10.1353/jef.2020.a760723>
- Sudirjo, F., Zunaidi, A., & Septiana, A. (2024). Increasing the competitive advantage of sharia rural financing banks (BPRS) products through a marketing mix strategy: The approach of Hermawan Kartajaya and Muhammad Syakir Sula. *Wadiah*, 8(2), 216–241. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1355>
- Valencia-Arias, A., Chalela, S., Cadavid-Orrego, M., Gallegos, A., Benjumea-Arias, M., & Rodríguez-Salazar, D. Y. (2023). University dropout model for developing countries: A colombian context approach. *Behavioral Sciences*, 13(5), 382. <https://doi.org/10.3390/bs13050382>
- Walker, J., Martin, M., Seery, E., Abdo, N., Kamande, A., & Lawson, M. (2022). *The Commitment to Reducing Inequality Index 2022*. <https://doi.org/10.21201/2022.9325>
- Wirian, O., Agustina, N., & Siahaan, A. (2022). Model-model pembiayaan pendidikan. *Educate: Journal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 44–56. <https://doi.org/10.56114/edu.v1i1.211>
- Yoshida, K., Tanaka, S., & Hirosato, Y. (2018). *Transforming education financing for inclusive, equitable and quality learning outcomes for the 2030/SDG4 Agenda*. T20 Policy Brief. In *Bridges to the Future of Education: Policy Recommendations for the Digital Age*. T20 Argentina.